

KEPEMIMPINAN MORAL DALAM PERPEKTIF *THE MODEL FOR INTERPERSONAL TEACHER BEHAVIOR*

***Hafis Muaddab¹⁾, Khudrotun Nafisah²⁾**

1) Pasca Sarjana Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang, Indonesia

2) Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darul Ulum, Indonesia

*Email Korespondensi: hafismuaddab@smkn1jombang.sch.id

Diterima Redaksi: 23-03-2023 / Selesai Revisi: 15-04-2023 / Diterbitkan online: 17-04-2023

Abstrak

Ungkapan nilai dasar dan etika manajemen merupakan acuan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam situasi tertentu. Ketika nilai-nilai inti digabungkan dengan kepemimpinan, itu berarti nilai-nilai referensi di bawah perilaku pemimpin dalam pelaksanaan kepemimpinan dalam perspektif sosiologis, model perilaku seorang guru hubungan interpersonal. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi pustaka melalui catatan, berbagai buku, majalah dan penelitian sebelumnya. Seorang pemimpin yang efektif adalah orang yang merespon dengan baik semua masalah, kebutuhan, harapan dan impian orang-orang yang dipimpinnya. Dalam akhlak kepemimpinan sekolah, tindakan seorang pemimpin yang dianggap baik dan benar mencerminkan akhlakul karimah dan dari segi sosial merupakan kegiatan yang beradab. Seorang pemimpin yang bermoral harus memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah) dan perbuatannya merupakan perbuatan yang beradab yang pada umumnya dianggap baik dan benar oleh masyarakat.

Kata Kunci: kepemimpinan moral; identitas moral; reformasi kurikulum; relasi antar pribadi

Abstract

The expression of basic values and management ethics is a reference that can influence human behavior in certain situations. When core values are combined with leadership, it means the reference values under the leader's behavior in the exercise of leadership in a sociological perspective, a teacher's model of interpersonal relations behavior. This research is a literature study that aims to collect literature information through notes, various books, magazines, and previous research. An effective leader is someone who responds well to all the problems, needs, hopes, and dreams of the people he leads. In the morals of school leadership, the actions of a leader who is considered good and right reflect akhlakul Karima and from a social point of view are civilized activities. A moral leader must have good morals (akhlakul karimah) and his actions are civilized actions that are generally considered good and right by society.

Keywords: moral leaderships; moral identity; curriculum reform; interpersonal relationship.

PENDAHULUAN

Menurut Richard L. Daft dalam buku *The Leadership Experience* (edisi 7), Kepemimpinan moral adalah tentang membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan yang benar, mencari perilaku yang adil, jujur, baik, dan benar dalam mencapai tujuan dan memenuhi tujuan. Oleh karena itu, pemimpin memiliki pengaruh besar atas orang lain, dan kepemimpinan moral mengangkat orang dan meningkatkan kehidupan orang lain. Kepemimpinan yang tidak bermoral mengambil dari orang lain untuk meningkatkan diri sendiri. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan moral menjadi sangat penting, karena para guru dan pendidik memiliki peran yang besar dalam membentuk karakter dan moral anak-anak. Khususnya dalam kasus yang menggemparkan publik dalam beberapa hari terakhir ini dan menjadi sorotan publik yang ramai diperbincangkan, merupakan residu dari permasalahan pendidikan yang gagal membentuk karakter moral. Pertama, penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora, putra dari salah satu petinggi Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio, putra dari seorang pejabat di Ditjen Pajak. Kedua, penyiksaan dan dipaksa minum alkohol 96 persen oleh temannya, yang berakibat kematian dua pelajar di Makassar. Tidak hanya menewaskan dua pelajar, beberapa korban lain diketahui masih kritis di rumah sakit (detik.com, 3 Maret 2023 6:04 WIB). Ketiga, kasus penyiksaan Mario terhadap David dan gaya hidup Mario yang hedonis, telah mengundang dugaan publik bahwa ayahnya yang merupakan pejabat di Ditjen Pajak dan kaya raya, diduga telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan keluarga, sehingga KPK panggil Rafael Alun untuk jelaskan asal harta Rp 56,1 milyar (CNN Indonesia, Senin, 27 Feb 2023 14:30 WIB).

Tiga kasus yang dikemukakan di atas, yaitu penganiayaan terhadap David, penyiksaan yang mengakibatkan dua pelajar tewas, serta dugaan korupsi yang dilakukan RAT, jika merujuk tujuan pendidikan nasional kita dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memiliki budi pekerti yang luhur serta memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa,” maka seharusnya tidak terjadi tiga hal yang dikemukakan di atas. Dalam studinya, Karakuş, Gülçin¹ (2022) dedikasi seorang guru dalam menegakkan moral dan etika menjadi factor penting dalam menurunkan praktik kekerasan di Lembaga Pendidikan. Sebagai sosiolog fungsional, Durkheim dalam Hidayat, R. (2014) mengatakan seluruh pendidikan adalah pendidikan moral (all education is moral educations). Durkheim memberikan pemikirannya tentang moralitas sebagai suatu set lengkap dari tugas dan kewajiban yang memengaruhi perilaku yang dimiliki oleh individu. Prinsip moralitas dalam membentuk sikap, Tindakan serta perilaku seseorang dicontohkan Ketika anak-anak berada di sekolah.

Melalui sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan untuk memperkenalkan nilai-nilai bersama untuk membantu generasi muda untuk beradaptasi di masyarakat. Beberapa tanggung jawab sekolah termasuk mengembangkan perilaku, sikap, dan membangun siswa siswa moralitas. Inilah kompleksitas harapan pada sekolah, yang kemudian merujuk pada perdebatan tentang kecukupan biaya dan upaya dalam bentuk reformasi kurikulum. Reformasi dalam kurikulum mencakup daftar nama pelajaran yang akan diajar, memutuskan proporsi untuk setiap mata pelajaran di sekolah-sekolah, dan memprioritaskan nilai-nilai moral yang akan ditanamkan. Lebih penting lagi, pemilihan dan prioritas aspek dalam kurikulum sekolah melibatkan ideologi yang ada (MacDonald, 2003; Bernstein, 2000). Setelah keputusan dibuat, proses reformasi dalam kurikulum diperlukan perencanaan, diseminasi, pelatihan untuk guru, dan implementasi.

Studi telah mengidentifikasi bahwa kurikulum dalam sistem pendidikan bertujuan untuk mencapai dua tujuan yang berbeda: 1) menghidupkan kembali identitas nasional; dan 2) untuk membekali siswa untuk menghadapi negara-negara 'tantangan masa depan (Yates dan Grumet, 2011). Dua tujuan kurikulum mencerminkan strategi bangsa untuk menghadapi masyarakat global yang lebih kompetitif dalam bentuk pasar bebas (seperti ASEAN Economic Community) dan untuk memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Sehubungan dengan dua tujuan ini, Bernstein menarik konsep identitas

¹ Karakuş, Gülçin. (2022). Literature Review of Studies about Violence at School and Recommendations for Teachers. *Acta Educationis Generalis*. 12. 63-84. 10.2478/atd-2022-0024.

pedagogik tentang pengetahuan resmi adalah pengetahuan pendidikan yang konstruksi oleh negara dan didistribusikan di lembaga pendidikan (Bernstein, 2000, hal. 65). Dalam modalitas yang berbeda dari reformasi, bias dan fokus pengetahuan resmi membangun identitas pedagogik yang berbeda. Perjuangan antara kelompok-kelompok untuk mengubah bias mereka dan fokus ke dalam kebijakan Negara dan praktek dapat dilihat dalam perspektif ini sebagai sumber reformasi kurikulum. Permodelan posisi negara dalam reformasi pendidikan, menunjukkan empat posisi (Bernstein, 2000) . Posisi ini merupakan pendekatan negara yang berbeda untuk mengatur dan mengelola perubahan kurikulum, pendekatan yang diharapkan untuk membentuk identitas pedagogik guru dan siswa. Dalam model Bernstein, dua identitas ini (retrospektif dan prospektif) dikelola oleh negara dan dua yang dihasilkan dari sumber daya lokal.

Konsep Bernstein (2000) tentang identitas pedagogik dapat dikaitkan dengan Yates dan Grummet (2011) tentang pendapat mengenai dua gol bersaing dalam kurikulum. Ini menunjukkan bahwa reformasi kurikuler dipandang sebagai upaya negara untuk menghidupkan kembali identitas nasional (identitas pedagogik retrospectif) serta untuk mempersiapkan pemuda untuk dunia. Kompetisi (identitas calon pedagogik). Dua gol lawan ditarik oleh Yates dan Grumet (2011) dan (2000) identitas pedagogik Bernstein menyiratkan harapan kompleks dan proyeksi orang di hasil pendidikan. Dalam hal ini, hasil pendidikan masyarakat mengharapkan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menguasai mata pelajaran yang diajarkan tetapi juga mengubah perilaku, sikap dan moralitas peserta didik sedemikian rupa bahwa peserta didik mampu beradaptasi dalam masyarakat yang lebih global.

Demikian pula, filsafat yang sama telah meresap dalam kurikulum sekolah di Indonesia dalam hal pemilihan dari mata pelajaran yang diajarkan serta memprioritaskan nilai-nilai moral. Berbagai mata pelajaran yang diajarkan dan nilai-nilai moral dalam kurikulum yang sengaja dipilih oleh otoritas pendidikan dan sekolah dalam rangka mengatasi tujuan tersebut . Namun, beberapa tujuan menyebabkan dilema di antara para pembuat kebijakan dalam memutuskan apa moralitas untuk memperkenalkan dan apa yang diajarkan. Dilema dan resolusi tercermin dalam reformasi kurikulum, antara

moralitas sekuler dan agama ; nilai-nilai universal atau nilai-nilai lokal / nasional ; dan dilema dalam pemilihan kurikulum.

Dalam hal mengembangkan moralitas siswa, di tahun 1920 Durkheim memperkenalkan konsep “Latihan moral” menjelaskan bahwa sekolah sebagai tempat yang penting untuk memenuhi harapan bangsa untuk generasi muda (Durkheim, 1961). Sehubungan dengan argumentasi ini, Durkheim (1961) menyarankan bahwa pendidikan merupakan alat penting untuk memungkinkan peserta didik untuk mengadopsi nilai-nilai bersama milik bangsa. Ini berarti, dalam masyarakat multi- etnis/budaya seperti Indonesia, sekolah perlu mengambil nilai-nilai moralitas yang bersifat sekuler - bukan moralitas agama. Membangun kondisi sosial kemasyarakatan yang kohesif dan untuk menghindari generasi muda terjebak dalam konflik sektarian.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

HASIL PENELITIAN

Kurikulum penanaman nilai adalah salah satu jenis kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan karakter pada siswa. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan sosial, serta membantu mereka mengembangkan karakter dan kepribadian yang baik. Kurikulum penanaman nilai biasanya mencakup pembelajaran nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung

jawab, toleransi, kerja sama, kedisiplinan, kesederhanaan, kerendahan hati, serta nilai-nilai lain yang dianggap penting dalam membentuk karakter dan moral siswa. Pembelajaran ini biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, simulasi, permainan peran, dan kegiatan lain yang menarik dan interaktif. Penerapan kurikulum penanaman nilai juga melibatkan semua anggota sekolah, termasuk guru, siswa, staf, dan orang tua. Semua orang di lingkungan sekolah harus berpartisipasi dalam memperkuat nilai-nilai moral dan karakter yang diinginkan dalam siswa.

Tidak hanya itu, kurikulum penanaman nilai juga diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara siswa, guru, dan orang tua, serta membantu meningkatkan prestasi akademik siswa. Hal ini dikarenakan, nilai-nilai moral dan karakter yang baik membantu siswa untuk memahami nilai penting dari pendidikan dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Dalam konteks sosial, kurikulum penanaman nilai juga memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda yang baik dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih harmonis. Dengan mengembangkan karakter dan moral siswa, diharapkan mereka akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kurikulum penanaman nilai memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan moral siswa, serta membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam penerapannya, semua anggota sekolah harus terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memperkuat nilai-nilai moral dan karakter yang diinginkan. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, Kurikulum Nasional Indonesia telah direformasi sepuluh kali. Review kurikulum pertama adalah pada tahun 1947, dan kemudian lebih lanjut reformasi diikuti pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2010 dan 2013. Pada tahun 1952, reformasi pendidikan ditujukan kebutuhan dari negara yang baru merdeka dan masyarakat pedesaan (Yulaelawati, 2001). Jadi, patriotisme menjadi prioritas di kurikulum 1952. Kurikulum berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai tertentu dan keyakinan tetapi kurang peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kurikulum termasuk penjelasan tentang fenomena alam, budidaya estetika, dan pemberantasan takhayul dan kekerasan (Yulaelawati, 2001). Dalam 1964 reformasi pendidikan, ideologi nasional ditekankan.

Dalam kurikulum ini Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, juga intensif diajarkan untuk mempromosikan persatuan di negara multi-etnis ini.

Dengan dimulainya pemerintahan Orde baru, rencana kurikulum 1968 dibangun untuk menekankan ideologi nasional Pancasila. kurikulum ini ditujukan untuk peserta didik untuk internalisasi lima prinsip Pancasila ini. Pada tahun 1975, terdapat kurikulum baru diperkenalkan yang bertujuan untuk mengintensifkan instruksi dalam Pancasila untuk anak-anak berusia enam dan di atas, yang mempelajari lima prinsip di luar kepala dan diperintahkan setiap hari untuk menerapkan makna dari prinsip-prinsip kehidupan mereka (Hadi, 2002). Kedua, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional (Fearnley-Sander & Yulaelawati, 2008). Pemerintah memperkenalkan P4 latihan. Pelatihan P4 adalah kursus yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan berlatih Pancasila, UUD 1945, dan Prinsip Umum Nasional Kebijakan, dimulai untuk mahasiswa baru di SMP dan SMA, hingga Universitas, (Nishimura, 1995) dan diperkenalkan ke semua sektor masyarakat (Budiman, Mangoenkoesoemo, Wardhani, & Utami, 2012).

Pada tahun 1984, pemerintah meninjau kembali kurikulum sebelumnya, dan memperkenalkan petunjuk khusus untuk pengalaman belajar fungsional dan efektif di masa sekolah (Machmud, 2011) ini yang kita kenal kemudian dengan CBSA. Dalam reformasi 1994 kurikulum yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan dengan tren global dan untuk memberikan kabupaten setempat ditingkat provinsi otonomi yang lebih untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencerminkan kondisi lokal mereka (Yeom, Acedo, & Utomo, 2002). 1994 Kurikulum memperkenalkan pemecahan masalah, pemikiran dan penyelidikan kritis keterampilan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi (Fearnley-Sander & Yulaelawati, 2008).

Pada tahun 2004, kurikulum yang menekankan kompetensi peserta didik diperkenalkan untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum 2004 dikandung sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Setiap mata pelajaran dirinci berdasarkan kompetensi apa yang mesti di capai siswa. Kerancuan muncul pada alat ukur pencapaian kompetensi siswa yang berupa Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional yang masih berupa soal pilihan ganda. Bila tujuannya pada

pencapaian kompetensi yang diinginkan pada siswa, tentu alat ukurnya lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur sejauh mana pemahaman dan kompetensi siswa. Pada awal 2006 uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Kurikulum 2013 adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam Kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan.

Moralitas Hubungan Interpersonal Guru-Siswa

Durkheim dalam Hidayat (2014) moralitas terdiri dari seperangkat aturan dan prinsip-prinsip, karakteristik yang sangat khusus yang membedakan mereka dari aturan dan standar lainnya. Moralitas dibangun oleh tiga elemen yaitu disiplin, keterikatan sosial (attachment social) dan otonomi. Penanaman moralitas akan berjalan dengan efektif jika proses internalisasinya memiliki strategi yang baik dari guru di lingkungan sekolah maupun orang tua di rumah. Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi kualitas kehidupan (Harahap, Gartanti, & Ahmadi, 2018). Rogers dalam Rakhmat (2012) mengatakan bahwa semakin baik komunikasi interpersonal, semakin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya dan semakin positif persepsinya terhadap orang lain melebihi persepsi dirinya.

Oleh Karena itu, orang tua dan guru tidak mungkin untuk mengajar tanpa dialog nilai-nilai disekitarnya dan tanpa berlari ke dilema moral di sekolah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cees Klaassen, pendapat populer yang ditemukan di antara orang tua, "Saya tidak mempekerjakan robot. Saya ingin orang-orang yang terlibat dengan anak-anak saya." (Klaassen, 2012). Bahkan lebih, seperti anak-anak mereka, orang tua merasa lebih stres untuk memenuhi tuntutan untuk bekerja dan memenuhi tanggung jawab keluarga mereka. Penelitian menunjukkan bahwa bagi orang tua yang terlalu banyak bekerja diluar rumah, mereka meragukan kapasitas dirinya sebagai mentor moral sehingga mencari sekolah-sekolah untuk mengambil peran lebih besar dalam perkembangan moral anak-anak mereka." (Weissbourd, 2012). Terkait dengan perilaku siswa, keinginan orang tua

untuk sekolah mengajarkan nilai-nilai, peran guru membuktikan sekali lagi untuk bahwa pendidikan moral melampaui batasan akademisi.

Namun hubungan interpersonal antara guru dan siswa di sekolah, memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pendidikan moral. Hal ini tampak pada penelitian tentang kaitan perilaku interpersonal guru dengan afektif siswa di sekolah. Berdasarkan pada penelitian Brekelmans, Levyand Rodriguez (1993), tipologi perilaku interpersonal guru di sekolah dapat dikategorikan dalam delapan tipe: pengarah (directive), otoriter (authoritative), otoritatif/semi toleran (tolerant/authoritative), permisif (tolerant), semi toleran (uncertain/tolerant), agresif (uncertain/aggressive), represif (repressive and penghukum (rudging). The Model for Interpersonal Teacher Behavior (MITB) adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi untuk memahami perilaku guru dalam interaksi interpersonal dengan murid-muridnya. MITB didasarkan pada dua dimensi yaitu dimensi struktur (structural dimension) dan dimensi afektif (affective dimension).

Dimensi struktur berkaitan dengan cara guru memberikan informasi dan instruksi kepada murid-muridnya. Dimensi afektif berkaitan dengan bagaimana guru memperlihatkan perhatian dan kasih sayang kepada murid-muridnya, serta cara mereka memotivasi dan membangun hubungan emosional dengan murid-muridnya. Menurut MITB, perilaku guru yang baik adalah perilaku yang memiliki keseimbangan antara dimensi struktur dan dimensi afektif. Seorang guru yang baik harus mampu memberikan instruksi dan informasi dengan jelas dan sistematis (dimensi struktur), serta mampu membangun hubungan yang emosional dan memotivasi murid-muridnya (dimensi afektif). Keseimbangan ini akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memperkuat hubungan antara guru dan murid.

Dalam perspektif sosiologi, MITB menekankan pentingnya interaksi interpersonal dalam proses pembelajaran. Interaksi interpersonal antara guru dan murid dipandang sebagai faktor penting dalam membentuk identitas, sosialisasi, dan pembelajaran sosial pada murid-murid. Sebagai hasilnya, peran guru dalam interaksi interpersonal dengan murid-murid menjadi sangat penting dalam membentuk karakter dan moral pada generasi muda. Secara keseluruhan, MITB memberikan kerangka konseptual yang berguna bagi

Tipe (directive), autoritatif (authoritative) dan semi toleran (tolerant/authoritative) menggambarkan tipe pengaruh yang sama; tiga tipe ini dicirikan dengan perilaku dominan yang berimbang. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan pada jumlah kepatuhan, guru pengarah misalnya memiliki tingkat kooperatif dengan siswa yang rendah. Tipe guru toleran memiliki tingkat kerjasama dengan siswa yang sama dengan guru autoritatif, tetapi sedikit berbeda dari tipe guru otoritatif dalam hal dominasi peran guru. Tipe-tipe yang lain yang tersisa menunjukkan tingkat kerjasama yang berbeda dalam dominasi peran guru dengan siswa (untuk lebih detail dapat dilihat pada Brekelmans, Wubbels & Levy, 1993).

Hampir setiap orang pernah mengalami perilaku guru interpersonal yang berbeda. Beberapa guru lain cenderung berjarak dan yang lainnya bersosialisasi. Beberapa terorganisir dengan baik dan lain-lain kacau. Berbagai macam karakteristik interpersonal yang telah melayani siswa menjadi dasar untuk membuat konseptualisasi perilaku antar pribadi guru (Wubbels, Creton, & Hooymeyers, 1985). Suatu pengembangan penelitian tentang perilaku antar pribadi guru telah sejalan dengan Pendekatan Sistem Komunikasi (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967) dan interpersonal Teori Kepribadian (Leary, 1957), yang membentuk dasar untuk Model Interpersonal Guru Perilaku (MITB).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap perilaku antar pribadi guru terkait dengan hasil afektif mereka. Brekelmans dan Wubbels (1991) menemukan sebuah hubungan antara kedekatan dan motivasi siswa. DenBrok (2001) menemukan kuat korelasi antara kedekatan dan kesenangan, relevansi, percaya diri dan dalam ruang kelas, sementara pengaruh berkorelasi kurang kuat dengan hasil tersebut. Van Amelsvoort (1999) menemukan bahwa unsur-unsur perilaku antar pribadi seperti bermanfaat / ramah dan memahami berkorelasi positif dengan hasil tersebut. Selain itu, Brekelmans (1989) melaporkan bahwa guru autoritatif dan directif cenderung memiliki efek terkuat pada perilaku siswa. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa kedekatan memiliki efek yang lebih kuat pada hasil afektif dari mempengaruhi (mis, denBrok, Brekelmans, & Wubbels, 2004 ; Wubbels & Brekelmans , 2005) .

Lebih jauh tentu telah terdapat jawaban tegas, atas pertanyaan tentang efek yang ditimbulkan dari kepemimpinan guru terhadap perilaku siswanya. Namun jawaban-jawaban sangat tergantung pada perilaku siswa dan variabel kepemimpinan sedang

dipertimbangkan. Dua perilaku siswa yang telah terbukti dipengaruhi oleh kepemimpinan guru adalah perilaku etis (moral) dan perilaku konflik interpersonal (Brown & Trevino, 2006a; Ehrhart, 2004). Dan yang terpenting, baik perilaku siswa telah terkait langsung dengan kinerja guru tersebut (Detert, Trevino, Burris, & Andiappen, 2007; Lepine, Piccolo, Jackson, Mathieu, & Saul, 2008).

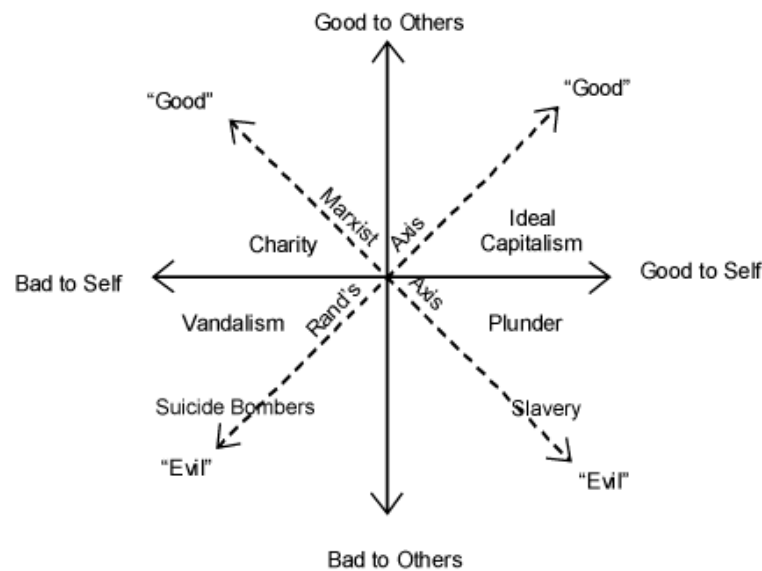
Kepemimpinan Moral dan Identitas Moral

Peran guru di lembaga pendidikan tentu tidak bisa dilepaskan dari beragam nilai-nilai yang ada di masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Sulit untuk menjadi efektif dalam lingkungan ini dan oleh karena itu membutuhkan kemampuan untuk tampil dalam sejumlah gaya yang berbeda dan untuk mengambil keputusan yang sebenarnya. Dalam kaitan ini kepemimpinan moral adalah gaya yang mengakui pentingnya nilai-nilai dan sikap dalam pengambilan keputusan (Hazel Mason and Heather Marlborough) Gaya kepemimpinan ini memerlukan kemampuan guru untuk menjadi praktisi reflektif menggunakan nilai-nilai dan sikap yang mereka miliki untuk mengatur pengambilan keputusan mereka. Menurut Sergiovanni (1992) ketika guru bertindak sebagai pemimpin moral yang mereka terdorong untuk melakukan hal yang benar tidak hanya apa yang benar.

Sebelum guru bisa mengajar perilaku moral, mereka sendiri harus dianggap sebagai contoh moral. Siswa menonton setiap gerakan guru membuat. Sementara itu berharga untuk mengajarkan nilai-nilai dalam karakter, penting untuk dicatat bahwa banyak instruksi moral yang terjadi melalui interaksi normal sehari-hari guru dengan siswa. Sebagai contoh, jika seorang guru menyadari mereka peroleh sesuatu di dalam kelas mereka yang bukan milik mereka, mereka harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada siswa bahwa mereka harus kembali ke pemilik yang sah dan mengapa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan demikian, jika seorang guru mengatakan kelas mereka bahwa mereka akan kelas dan kembali ujian siswa pada hari berikutnya, guru harus menepati janji mereka dan menyerahkan kembali tes ketika mereka mengatakan mereka akan. Sebaliknya, jika seorang guru terlihat menampilkan perilaku tidak bermoral seperti muncul ke sekolah terlambat atau berbicara negatif tentang guru

lain untuk siswa, ini mengirimkan pesan munafik. Siswa akan melihat bermuka dua dalam pelajaran moral instruktur mereka dan kehilangan motivasi untuk mengembangkan karakter mereka sendiri. Untuk menumbuhkan kematangan moral yang siswa, adalah penting perilaku moral yang model guru. Ketika siswa melihat guru mereka bertindak dengan cara-cara yang secara langsung mendukung apa yang mereka ajarkan, siswa lebih mungkin untuk mendengarkan, belajar dan menerapkan dengan perilakunya sendiri.

Dalam kaitan yang sama maka melalui teori moralitas Ayn Rand menyajikan moralitas dalam 2 Dimensi (seperti dalam kuadran). Keegoisan dan kebajikan dapat dilihat suatu sifat benar-benar terpisah. Satu dapat menjadi egois dan baik hati (kuadran kanan atas), atau egois dan jahat (kuadran kanan bawah). Hal ini dimungkinkan untuk mementingkan diri sendiri dan baik hati (kiri atas) atau mementingkan diri sendiri dan jahat (kiri bawah). Mereka yang suka mengutuk keserakahan sering mengurangi ini untuk melihat satu dimensi pergi dari kiri atas ke kanan bawah. Ayn Rand mencatat bagaimana pandangan ini merindukan keindahan kapitalisme dan mengambil pandangan yang orthogonal, dari kanan atas ke kiri bawah. Melalui konsep Ayn Rand ini kita melihat bahwa semua permutasi dari baik/buruk kepada orang lain/diri sendiri adalah mungkin. Oleh sebab itu, keberadaan guru menjadi sangat penting untuk menampilkan keteladanan moral di sekolah, untuk tidak hanya membelajarkan nilai dari bentuk verbal tetapi lebih afektif untuk diterapkan oleh siswa sebagai manusia muda.



Gambar 3. Kuadran Teori Moralitas Ayn Rand

Dalam kajian kitab klasik Indonesia konsep kepemimpinan moral guru ini sekaligus merupakan ide utama dalam karya KH. Hasyim Asy'ari *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim fima Yahtaju ilaih al-Muta'allim fi Ahwal Ta'limih wama Yatawaqqaf 'alaih al-Muallim fi Maqat Ta'limih* atau yang lebih dikenal sebagai kitab *Adabul 'Alim Wa Muta'allim*. Kitab ini menguraikan tentang etika hubungan timbal balik antara guru dan murid, murid dengan guru, dan juga etika dalam menuntut ilmu di pesantren. Ketiadaan adab (the lose adab) bagi KH. Hasyim Asy'ari berkonsekuensi berat terhadap kualitas ketauhidannya. Dalam kitabnya, *Adabul Alim wal-Muta'allim*, K.H. Hasyim Asy'ari mengintegrasikan antara adab dan iman. Barangsiapa yang tidak beradab maka sebenarnya ia tidak bersyari'at, tiada iman, dan tiada tauhid dalam dirinya². Moralitas hubungan timbal balik antara guru dan siswa senada dengan konsep Angela Lumpkin "teacher as role models, teaching character and moral virtues. Guru dengan karakter menampilkan integritas yang utuh antara kompetensi dan keteladanan. Menyajikan

keteladanan melalui kejujuran, menghargai sesama, menerima tanggungjawab sebagai pendidik, berlaku adil, menanamkan kepercayaan, dan menghidupkan nilai-nilai kehidupan.

Namun lebih penting dari sekedar pendidikan moral melalui kepemimpinan moral ini, maka sekolah harus mampu memberikan identitas moral kepada siswanya. Mengadopsi konsepsi sosial-kognitif identitas moral untuk menjelaskan hubungan antara identitas moral dan kepemimpinan etis. Identitas moral yang didefinisikan sebagai diri skema diorganisir sekitar satu set asosiasi sifat moral (misalnya, jujur, peduli, penuh kasih) (Aquino & Reed, 2002). Teori (misalnya, Aquino dan Reed, 2002; Blasi, 1980, 2004; Lapsley dan Lasky, 2001) berpendapat bahwa orang-orang berbeda dalam sejauh mana identitas moral yang dialami sebagai pusat keseluruhan definisi diri mereka. Dari perspektif kognitif sosial, perbedaan ini menyiratkan bahwa skema moral diri lebih kognitif diakses untuk beberapa orang daripada yang lain. Menurut Lapsley dan Lasky (2001: 347), orang yang memiliki identitas moral "Satu untuk siapa skema moral yang kronis yang tersedia, mudah prima, dan mudah diaktifkan untuk pengolahan informasi. Demikian pula, Aquino dan Reed (2002) menunjukkan bahwa identitas moral yang memiliki lebih tinggi diri penting bagi sebagian orang daripada yang lain, yang berarti bahwa pengetahuan khusus ini.

Struktur identitas adalah pusat keseluruhan konsepsi diri seseorang, sehingga lebih mudah tersedia untuk memproses informasi dan mengatur perilaku berbasis skema konsepsi identitas moral yang telah digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek fungsi moral dalam domain non-organisasi (Aquino & Freeman, 2009; Aquino & Reed, 2002; Lapsley & Lasky, 2001; Lapsley & Narvez, 2004; Reed & Aquino, 2003), tetapi hanya baru-baru ini identitas moral yang telah diperkenalkan ke dalam literatur manajemen (misalnya, Detert, Trevino, & Sweitzer, 2008; Reynolds & Ceranic, 2007). Sebagai contoh penelitian menunjukkan bahwa identitas moral berkaitan positif dengan perilaku prososial seperti kegiatan berbagi dan pemberian bantuan (Aquino & Reed, 2002; Reed et al., 2007) dan berhubungan negative dengan perilaku tidak etis seperti berbohong (Aquino et al., 2009; Reynolds and Ceranic, 2007)

Konsep Aquino dan Reed's (2002) tentang identitas moral memiliki dua dimensi, dimensi publik, yang kita kenal dengan simbolisasi dan dimensi privat (ekspresi pribadi), yang kita sebut internalisasi. Dimensi ini berkaitan dengan teori tentang konsep diri yang menjelaskan bahwa kesadaran diri (self-awareness) dapat dijelaskan sebagai kesadaran diri secara eksternal dan internal individu sebagai obyek sosial yang dapat memiliki pengaruh kepada orang lain dan sebuah pikiran dan kesadaran diri dalam bentuk perasaan bathin seseorang untuk melakukan introspeksi internal (Fenigstein, 1975). Individu dengan simbolisasi identitas moral yang tinggi akan menampilkan nilai moral yang mereka miliki dalam melalui tindakan moral (Aquino & Reed, 2002). Oleh sebab itu simbolisasi identitas moral berhubungan positif dengan kepemimpinan moral guru, sebab sudah selayaknya bagi para guru tersebut menampilkan perilaku positif yang mencerminkan manifestasi nilai kepemimpinan moral disekolah. Menjadi penting bagi para guru tersebut untuk berperilaku apa adanya, sebagaimana secara lahiriah seperti halnya cara mereka melihat dirinya sendiri. (Aquino & Reed, 2002; Reed & Aquino, 2003; Reynolds & Ceranic, 2007).

Implikasi Kepemimpinan Moral Di Sekolah

Untuk melihat implikasi kepemimpinan moral disekolah, kita dapat menggunakan teori perkembangan psikologis tentang bagaimana siswa dan guru harus menjaga identitas moral yang dimiliki. Perkembangan sosial seorang anak meningkat ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kebutuhan dan peraturan. Erik Erikson (1959), menyebutkan bahwa setiap individu harus menghadapi dan menyelesaikan tugas perkembangannya yang penting disetiap tahap untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang matang. Lingkungan dapat meningkatkan atau menurunkan perkembangan psikososial individu tergantung pada tingkat dukungan atau tantangan yang ada (Sanford, 1966). Individu juga dapat mundur atau kembali tahap perkembangan psikososial sebelumnya ketika menghadapi situasi stres atau kondisi yang baru. Untuk memungkinkan guru mendukung pengembangan moral pada siswa, sekolah perlu membantu guru dalam mengelola emosinya dalam pekerjaan dan meningkatkan kapasitas guru untuk melakukan refleksi dan empati.

Sejauh ini masih terdapat pandangan di masyarakat bahwa dengan sekolah akan anak-anaknya nanti menjadi orang baik dilingkungannya, tentu ini menjadi gambaran tingginya harapan masyarakat terhadap sekolah. Sehingga dalam beberapa muncul tuntutan masyarakat terhadap kinerja guru dan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal tentu tidak seutuhnya benar, sebab pengembangan moral tidak hanya bergantung pada pendidikan karakter di sekolah tetapi juga pada kematangan pribadi dan kapasitas etis dari orang dewasa yang berinteraksi dengan anak tersebut khususnya orang tua, guru, dan kelompok orang dewasa yang lain. Guru mempengaruhi siswa dalam pengembangan moral tidak dengan mudah hanya menjadi “good role models”, hal lain yang terpenting adalah tentang apa yang terbawa dalam interaksi dengan siswa selama di sekolah: kemampuan mereka untuk mengapresiasi perspektif siswa dan menguraikannya, kemampuan mereka untuk mengakui dan belajar dari kesalahan moral siswa, energy moral dan idealism guru, kedermawanan para guru dan kemampuan mereka dalam membantu siswa mengembangkan kecakapan moral tanpa merubah kemandirian mereka dalam persoalan moral. Hal ini tentunya sebuah tantangan bagi orang dewasa di sekolah. Dan itu berarti bahwa kita tidak akan pernah sangat meningkatkan' perkembangan moral siswa di sekolah tanpa mengambil tugas kompleks berkembang dewasa dan meningkatkan kapasitas etis mereka. Kita perlu memikirkan kembali sifat perkembangan moral itu sendiri saat ingin diberlakukan di sekolah .

Hubungan guru-murid membentuk perkembangan moral dalam arti lain -melalui pengaruh mereka pada perkembangan emosional siswa. Sebagian besar pembicaraan tentang perkembangan moral di sekolah mengasumsikan bahwa kita bisa mengajarkan siswa untuk berperilaku secara moral dengan menanamkan dalam mereka kebajikan dan standar etis, tentang benar dan salah. Asumsi ini mengabaikan fakta bahwa emosi terkadang sulit dikendalikan, terlebih pada usia belia. Jerome Kagan (1995) mengamati bahwa program pencegahan kekerasan yang menjelaskan kepada siswa konsekuensi buruk dari kekerasan sering tidak membantu karena anak sesungguhnya mereka tahu kekerasan adalah salah, tetapi yang mereka tidak tahu adalah bagaimana untuk dapat mengontrol rasa malu yang pada akhirnya dapat memicu perilaku kekerasan.

Dalam laporan Ethic American Youth di Amerika tahun 2012 mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan unsur pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Menurut penelitian tersebut, 57 persen remaja menyatakan bahwa orang-orang sukses melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menang, bahkan jika itu melibatkan kecurangan. Dua puluh empat persen percaya tidak apa-apa untuk mengancam atau memukul seseorang ketika marah. Tiga puluh satu persen percaya kekerasan fisik adalah masalah besar di sekolah mereka. Lima puluh dua persen dilaporkan melakukan kecurangan setidaknya sekali pada ujian. Empat puluh sembilan persen dari siswa melaporkan ditinds atau dilecehkan dengan cara yang serius membuat mereka tersinggung.

Banyak kali siswa tidak menyadari penyebab yang mendasari pilihan yang mereka buat. Hal ini terutama berlaku pada anak-anak muda. Jika guru dapat membantu siswa memahami moral penalaran dan proses orang pergi melalui dalam rangka untuk membuat keputusan saleh, mereka lebih mungkin untuk mengembangkan cara-cara moral yang otomatis. Dalam kasus seorang mahasiswa yang merasa stres mendapatkan nilai tertentu pada tes untuk lulus kelas SMA, kecemasan dapat menyebabkan siswa merasa dibenarkan dalam mencontek jawaban dalam ujian. Meskipun tindakan karena kecemasan ini dapat dikatakan normal, kita perlu mengajar beberapa cara berkaitan dengan kecemasan mereka. Anak-anak membutuhkan bantuan belajar untuk mengatasi perasaan ini dengan cara-cara yang produktif. "(Weissbourd, Jones, Anderson, Kahn & Russell 2014). Angela Lumpkin, seorang profesor di University of Kansas menjelaskan bahwa guru harus mengajarkan proses sistematis mengevaluasi situasi di mana seseorang dihadapkan untuk membuat benar atau pilihan yang salah. Menurut Lumpkin, tahap pertama adalah moral yang mengetahui, yang adalah bagaimana orang memahami perselisihan moral dan bagaimana menyelesaikan mereka. Kemudian, selama tahap kedua valuing moral, salah satu beratnya apa yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri dan orang lain. Akhirnya, tahap ketiga adalah akting moral di mana seseorang menggunakan apa yang mereka ketahui dan nilai untuk bertindak dalam situasi. Jika guru meluangkan waktu untuk mengajar tiga tahap ini, mereka akan membantu siswa membedakan antara benar dan salah dan menghindari rasionalisasi "perilaku berprinsip mereka dan sebagai gantinya menggunakan proses

penalaran moral ketika membuat keputusan." (Lumpkin, 2008). Hal ini sangat penting ketika siswa dibombardir dengan tekanan teman sebaya. Membuat keputusan moral sering menuntut siswa untuk melawan apa yang sering diterima dalam kelompok pertemanan mereka.

PENUTUP

Dalam kombinasi dengan pendidik yang memiliki kualitas panutan moral, juga diperlukan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mengembangkan hubungan yang terbuka dan jujur dengan siswa mereka. Siswa perlu merasa aman dan diterima sebelum belajar apapun dapat terjadi. Sangat penting untuk perspektif siswa dan opini disambut dan dihormati. Guru dapat melakukan ini dengan mendorong percakapan yang memungkinkan siswa untuk merasa tidak apa-apa untuk menjadi rentan dan mengungkapkan pengalaman otentik yang baik menunjukkan kesalahan moral atau kemenangan moral. Sebagai bentuk berbagi dengan siswa, guru harus mendengarkan siswa sebagai teman dan membantu membimbing mereka melalui situasi serta membantu mereka merasa seperti mereka mengerti. Siswa dapat merasakan ikatan emosional dan kognitif dengan model peran dengan siapa mereka membandingkan diri mereka sendiri dan dengan siapa mereka melihat bentuk diri untuk diri mereka sendiri. Guru perlu membekali siswa dengan alat dan kepercayaan diri untuk membuat pilihan etis ketika disajikan dengan kesempatan dan memungkinkan siswa untuk memiliki waktu untuk memproses metode penalaran ini. Memberikan kesempatan untuk berlatih dan mengevaluasi situasi fiktif yang akan membantu pemikiran moral siswa dan tindakan kemajuan dengan cara yang positif.

REFERENSI

- Aquino, K., & Freeman, D. (2009). *Moral identity in business situations: A social-cognitive framework for understanding moral functioning*. In D. Narvaez & D. K. Lapsley (Eds.) *Moral personality, identity, and character*: 375-395. Cambridge University Press.
- Aquino, K., Freeman, D., Reed, A. II, Lim, V. K. G., & Felps, W. (2009). *Testing a social cognitive model of moral behavior: The interaction of situational factors and*

- moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97: 123-141.*
- Aquino, K., & Reed, A. (2002). *The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83: 1423-1440.*
- Aquino, K., Reed, A., Thau, S., & Freeman, D. (2007). *A grotesque and dark beauty: How moral identity and mechanisms of moral disengagement influence cognitive and emotional reactions to war. Journal of Experimental Social Psychology, 43: 385-392.*
- Bernstein, B. (2000). *Pedagogy, Symbolic Control and Identity: theory, research and critique, (revised edn). Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.*
- Begley, P. (1999). *Guiding values for future school leaders. Orbit, 30, (1), 19-23.*
- Bogotch, I., & Miron, L. (1998). *Moral leadership: Discourses in Urban School Settings. Urban Education, 33, (3), 303-328.*
- Cheung, K. W. & Pan, S. (2006) *Transition of moral education in China: Towards Regulated Individualism. Citizenship Teaching and Learning, 2(2), 37-47. Retrieved from <http://www.citized.info>*
- Durkheim, E. (1961). *Moral education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education. New York: Free Press of Glencoe.*
- Fenigstein, A. (1975). *Public and private self-consciousness: Assessment and theory. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 43: 522-527*
- Fullan, M. (Ed.). (2007). *The new meaning of educational change. New York: Teachers College Press*
- Jerome Kagan. (1997) *Temperament and the Reactions to Unfamiliarity Child Development, Vol. 68, No. 1 (Feb., 1997), pp. 139-143 Published by: Wiley on behalf of the Society for Research in Child Development Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1131931>*
- K. Lapsley & D. Narvaez (Eds.), *Moral development, self, and identity: 189-212. Mahwah, NJ: Erlbaum.*
- Klaassen, C. (2012). *Just a teacher or also a moral example?. In D. Alt & R. Reingold (Eds.), Changes in teachers' moral role: From passive observers to moral and democratic leaders. Boston, MA: Sense Publishers.*
- Lapsley, D. K., & Lasky, B. (2001). *Prototypic moral character. Identity, 1: 345-363.*
- Lapsley, D. K., & Narvaez, D. (2004). *A social-cognitive approach to the moral personality. In D.*

- Lumpkin, A. (2008). *Teachers as role models teaching character and moral virtues. Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 79(2), 45-50. doi: 10.1080/07303084.2008.10598134
- Macdonald, D. (2003). *Curriculum change and the post-modern world: Is the school curriculum-reform movement an anachronism?. Journal of Curriculum Studies*, 35(2), 139-149. doi:10.1080/00220270210157605
- Qoyyimah, U. (2015). *EFL teachers professional dilemmas with moral curriculum reform in Indonesia (Unpublished doctoral thesis)*. Retrieved from <http://eprints.qut.edu.au/83676/>
- Rand, A. (1961). *For The New Intellectual*, New York: A Signet Book.
- Rand, A. (1964). *Virtue of Selfishness*. New York: A Signet Book.
- Rand, A. (1982). *Philosophy: Who Need it*, New York: A Signet Book.
- Rand, A. (1964, Maret). *Playboy Interview: Ayn Rand – Candid Conversation With The Fountainhead Of “Objectivism”*. *Playboy*, 35 – 60.
- Reed, A., & Aquino, K. F. 2003. *Moral identity and the expanding circle of moral regard toward out-groups. Journal of Personality and Social Psychology*, 84: 1270-1286.
- Reed, A., Aquino, K., & Levy, E. 2007. *Moral identity and judgments of charitable behaviors. Journal of Marketing*, 71: 178-193.
- Reynolds, S. J., & Ceranic, T. 2007. *The effects of moral judgment and moral identity on moral behavior: An empirical examination of the moral individual. Journal of Applied Psychology*, 92: 1610-1624.
- Sergiovanni, T. (1992). *Moral Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc.
- Weissbourd, R., Jones, S., Anderson, T. R., Kahn, J., & Russell, M. (2014). *The children we mean to raise: The real messages adults are sending about values*. In R. Weissbourd (Ed.), *Cambridge, MA: The President and Fellows of Harvard College*.
- Yates, L., & Grumet, M. (Eds.). (2011). *Curriculum in today's world: Configuring knowledge, identities, work and politics*. New York: Taylor & Francis.